

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
DI SKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

IRA GUSTINA¹

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Email : iragustina85@yahoo.co.id

FENI FEBRIYANTI²

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Email : fenifebridianti2@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine empirically whether public accountability, clarity of budget targets and reporting systems affect managerial performance in the SKPD of Indragiri Hilir Regency. This research was conducted at 31 SKPD in Indragiri Hilir Regency. The type of data used is primary data. In this study questionnaires were distributed as many as 93 questionnaires but only 88 were processed data and the remaining 5 were questionnaires that could not be processed. The data analysis model used in this study is multiple linear regression analysis, data quality test and classical assumption test. The results of this study indicate that public accountability, clarity of budget targets and reporting systems affect managerial performance. The value (R²) or the coefficient of determination is 40.7% which means that public accountability, clarity of budget targets and reporting systems are able to explain managerial performance while the remaining 59.3% is influenced or explained by other factors.

Keywords: *Public Accountability, Clarity of Budget Target, Reporting Systems and Managerial Performance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan pada 31 SKPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis data yang dipakai adalah data primer. Di dalam penelitian ini kuesioner yang disebar sebanyak 93 kuesioner namun data yang dapat diolah hanya 88 dan 5 kuesioner sisanya merupakan kuesioner yang tidak dapat diolah. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nilai (R²) atau nilai koefisien determinasi sebesar 40,7 % yang berarti bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan mampu menjelaskan kinerja manajerial sedangkan sisanya sebesar 59,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Kata kunci : *Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kinerja Manajerial*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengacu pada meningkatnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran daerah tersebut. Mulai dari kepala daerah hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dibawahnya. Keadaan ini dapat diartikan sebagai meningkatnya partisipasi pegawai dari tingkatan bawah dalam proses penyusunan anggaran (Efrizar, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009) penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralis partisipatoris. Sebagai salah satu organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang memiliki orientasi kepada kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya.

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki ciri khas sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan margin telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang bersifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh

masyarakat dan semakin meratanya distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya (www.riau.go.id).

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan pemantauan dari Bupati Indragiri Hilir, M Wardan yang melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya instansi pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat dimana setelah melakukan pemantauan kehadiran para pegawai, pelayanan dan aktivitas pelayanan publik yang ada di Indragiri Hilir maka Bupati menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kehadiran pegawai cukup baik (www.mediacenter.riau.go.id).

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Mardiasmo, 2009).

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunan harus memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat serta model-model perhitungan jajarannya dalam manajemen dalam suatu organisasi. Kejelasan sasaran anggaran sangat membantu untuk mencapai kinerja manajerial yang diharapkan dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja yang diharapkan dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kualitas pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pengukuran penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Salah satu karakteristik penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut sehingga dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Solina, 2014).

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Tujuan dan sasaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja (Anderson, 2015). Anggaran harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian di dalam kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah menggambarkan sasaran kinerja secara jelas dan spesifik.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, seperti penelitian Nugraha (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial sementara desentralisasi dan akuntabilitas publik tidak dapat membuktikan penerapan yang baik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penelitian Nugraha (2015) yang meneliti pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, memperlihatkan rendahnya realisasi program atau kegiatan dan lemahnya pencapaian anggaran yang tidak mencapai target sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tingginya SILPA ini menggambarkan kinerja SKPD di lingkungan pemerintahan Indragiri Hulu masih lemah penyebabnya dari lemahnya serapan anggaran ini adalah tidak berjalannya dengan efektif program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Penelitian Efrizar (2017) menunjukkan hasil bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Efrizar (2017) pada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa Pemda dituntut untuk mempunyai kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan pembagian tugas yang baik dalam mengkoordinasi Aparatur pemerintah daerah seperti Sekretariat Daerah, SKPD dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk lebih berorientasi pada kepentingan publik, pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada masyarakat yang berkesinambungan.

Darmawan (2016) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Darmawan (2016) yang meneliti pada SKPD Kabupaten Bengkalis memperlihatkan rendahnya realisasi program atau kegiatan dan lemahnya serapan anggaran sehingga menyebabkan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD 2011-2013 yang masing-masingnya mencapai 30 persen. SILPA tertinggi terjadi tahun 2011 yang mencapai 37 persen. Hal ini membuktikan bahwa APBD setiap tahun tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir ?
4. Apakah akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas publik dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Sedangkan dalam arti luas, akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Aini, 2016).

Menurut Mahsun *et al*, (2015) dalam Kurnia (2016) akuntabilitas publik terbagi dari dua macam antaranya:

1. Akuntabilitas Secara Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Secara Horizontal

Akuntabilitas secara horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dimana konteks organisasi publik itu berguna untuk pemberian informasi atas aktifitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Amalia (2017) pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Darmawan (2016) menyatakan anggaran merupakan hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan yang menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan, penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu dan akhirnya tahap pengawasan. Kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam berkerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Aini, 2016).

Amalia (2017) menyatakan bahwa agar pengukuran sasaran efektif maka terdapat 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya kejelasan anggaran.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Menurut Kanji (2016) tujuan atau sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut:

1. Spesifik, sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
2. Terukur, sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Menantang tapi realitas, sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4. Berorientasi pada hasil akhir, sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
5. Memiliki batas waktu, sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

UU No. 17 Tahun 2005 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut maka perlu aturan yang jelas mengenai peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Bagian keuangan memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya sehingga aparat secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran.

2.3 Sistem Pelaporan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Menurut Mardiasmo (2009) lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non finansial.

Menurut Andi (2008) dalam Nurlia (2018) bahwa sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Laporan harus menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Riani (2015) menyatakan bahwa sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indikator dalam sistem pelaporan dalam Nurlia (2018) adalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya penyimpangan
2. Target dan realisasi dalam pelaporan
3. Lamanya waktu koreksi
4. Sebab-sebab penyimpangan
5. Tindakan yang diambil

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara aktual, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Menurut UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan.

2.4 Kinerja Manajerial

Kanji (2016) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan representasi.

Pengertian kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang dalam impres No. 7 tahun 1999 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi dan misi organisasi. Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu atau kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Efrizar, 2017).

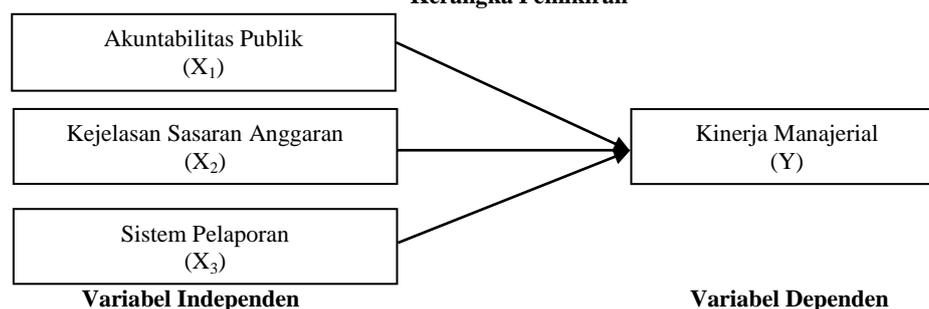
Ira Gustina-Feni Febriyanti, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir

Melia (2019) kinerja manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh personil atau sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional organisasi. Pada umumnya kinerja karyawan bersifat konkrit, sedangkan kinerja manajerial bersifat abstrak atau kompleks.

Kinerja manajerial merupakan salah satu jawaban yang dimana berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang ditetapkan seorang manajer. Suatu pengukuran kinerja manajerial mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya sebab berkaitan dengan pertanggungjawaban alokasi anggaran daerah. Tujuan pokok kinerja adalah untuk memotivasi tujuan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan dengan melalui umpan balik kerja (Mukaromah, 2018).

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar. 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesa

H₁ : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir

H₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir

H₃ : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir

H₄ : Akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir

3 METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan struktural dan aparat yang memiliki peran dalam penyusunan anggaran pada setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang tersebar di 31 SKPD.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria dalam sampel penelitian ini adalah aparat eselon II, III, dan IV yaitu Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

3.3 Prosedur dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung ke responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013).

Adapun studi pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dan pelengkap informasi didapat dari buku, internet dan sumber data tertulis lainnya, baik berupa teori maupun laporan penelitian atau penemuan sebelumnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Independen

3.4.1.1 Akuntabilitas Publik (X_1)

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada pihak pemegang amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Mahmudi (2013) pertanggungjawaban publik menggunakan lima indikator oleh pemerintah daerah: (1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, (2) Akuntabilitas Manajerial, (3) Akuntabilitas Program, (4) Akuntabilitas Kebijakan, (5) Akuntabilitas Keuangan. Instrumen pertanyaan dalam kuesioner variabel akuntabilitas publik menggunakan 9 (sembilan) instrumen pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Melia (2019).

3.4.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)

Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kegiatan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja tersebut. Aini (2016) kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakejelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam berkerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Variabel ini diukur dengan 7 (tujuh) indikator : (1) tujuan, (2) kinerja, (3) standar, (4) jangka waktu, (5) sasaran prioritas, (6) tingkat kesulitan, (7) koordinasi. Instrumen pertanyaan dalam kuesioner variabel kejelasan sasaran anggaran menggunakan 7 (tujuh) instrumen pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Melia (2019).

3.4.1.3 Sistem Pelaporan (X_3)

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Efrizar, 2017). Variabel ini diukur dengan 5 (lima) indikator : (1) Penyebab terjadinya penyimpangan, (2) Target dan realisasi dalam pelaporan, (3) Lamanya waktu koreksi, (4) Sebab-sebab penyimpangan, (5) Tindakan yang diambil. Instrumen pertanyaan dalam kuesioner variabel sistem pelaporan menggunakan 5 (lima) instrumen pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Nurlia (2018).

3.4.2 Variabel Dependen

3.4.2.1 Kinerja Manajerial (Y_1)

Kinerja manajerial pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, isi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat instansi tersebut (Nugraha, 2015). Pengukuran variabel menggunakan 8 (delapan) indikator : (1) Perencanaan, (2) Investigasi, (3) Koordinasi, (4) Evaluasi, (5) Pengawasan, (6) Pemilihan Staf, (7) Negoisasi, (8) Perwakilan. Instrumen pertanyaan dalam kuesioner variabel kinerja manajerial menggunakan 8 (delapan) instrumen pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Sartika (2018).

3.5 Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui apakah hipotesis ini diterima atau ditolak maka penelitian ini diuji dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah alat analisis peramalan nilai berpengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda yang di gunakan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	= kinerja manajerial
α	= nilai konstanta
$\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$	= koefisien regresi
X_1	= akuntabilitas publik
X_2	= kejelasan sasaran anggaran
X_3	= sistem pelaporan
ϵ	= error

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari dinas, kantor, badan dan inspektorat. Sampel disebarkan sebanyak 93 kuesioner dan kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 88 kuesioner. Penelitian ini jugak dilakukan kurang lebih 3 bulan.

Berikut adalah gambaran kuesioner yang sudah disebar dan tingkat pengembalian kuesioner yang dikembalikan oleh responden :

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	93
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	5
Jumlah Kuesioner yang dapat diolah	88
Tingkat Pengembalian	95 %

Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 93 kuesioner yang dikirim, ada 5 kuesioner yang tidak dapat diolah, sehingga kuesioner yang dapat diolah ada 88 kuesioner yang bisa diolah oleh peneliti sehingga tingkat pengembalian kuesioner mencapai 95%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Adapun deskripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Akuntabilitas Publik	88	22	43	33.87	4.320	18.662
Kejelasan Sasaran Anggaran	88	16	35	26.52	3.510	12.321
Sistem Pelaporan	88	14	25	19.76	2.528	6.391
Kinerja Manajerial	88	19	40	29.61	3.955	15.642
Valid N (listwise)	88					

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata variabel akuntabilitas publik 33,87 dengan standar deviasinya 4,320. Rata-rata variabel kejelasan sasaran anggaran 26,52 dengan standar deviasinya 3,510. Rata-rata variabel sistem pelaporan 19,76 dengan standar deviasinya 2,528. Rata-rata variabel kinerja manajerial 29,61 dengan standar deviasinya 3,955. Adapun hasil maksimum untuk variabel akuntabilitas publik adalah 43 dengan minimum 22. Maksimum untuk variabel kejelasan sasaran anggaran 35 dengan hasil minimum 16. Maksimum untuk variabel sistem pelaporan 25 dengan hasil minimum 14, dan maksimum untuk variabel kinerja manajerial adalah 40 dengan hasil minimum 19.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan atau kevalitan suatu instrumen. Penelitian ini memiliki jumlah sampel sebanyak 88 sampel sehingga dapat dihitung besarnya df pada penelitian ini sebesar $df=88-2$ maka diperoleh nilai r_{table} sebesar 0,209 ($\alpha=5\%$). Adapun uji validitas untuk variabel akuntabilitas publik dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,691	0,209	Valid
Pertanyaan 2	0,661	0,209	Valid
Pertanyaan 3	0,635	0,209	Valid
Pertanyaan 4	0,692	0,209	Valid
Pertanyaan 5	0,580	0,209	Valid
Pertanyaan 6	0,709	0,209	Valid
Pertanyaan 7	0,740	0,209	Valid
Pertanyaan 8	0,671	0,209	Valid
Pertanyaan 9	0,653	0,209	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, pengujian validitas instrumen penelitian (kuesioner) dengan 9 pertanyaan untuk variabel akuntabilitas publik mendapatkan nilai r hitung > r tabel sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

Adapun uji validitas variabel kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,688	0,209	Valid
Pertanyaan 2	0,663	0,209	Valid
Pertanyaan 3	0,717	0,209	Valid
Pertanyaan 4	0,731	0,209	Valid
Pertanyaan 5	0,664	0,209	Valid
Pertanyaan 6	0,632	0,209	Valid
Pertanyaan 7	0,685	0,209	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, pengujian validitas instrumen penelitian (kuesioner) dengan 7 pertanyaan untuk variabel kejelasan sasaran anggaran mendapatkan nilai r hitung > r tabel sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

Adapun uji validitas variabel sistem pelaporan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pelaporan

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,768	0,209	Valid
Pertanyaan 2	0,660	0,209	Valid
Pertanyaan 3	0,691	0,209	Valid
Pertanyaan 4	0,699	0,209	Valid
Pertanyaan 5	0,736	0,209	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, pengujian validitas instrumen penelitian (kuesioner) dengan 5 pertanyaan untuk variabel sistem pelaporan mendapatkan nilai r hitung > r tabel sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

Adapun uji validitas untuk variabel kinerja manajerial dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Manajerial

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,696	0,209	Valid
Pertanyaan 2	0,702	0,209	Valid
Pertanyaan 3	0,668	0,209	Valid
Pertanyaan 4	0,593	0,209	Valid
Pertanyaan 5	0,720	0,209	Valid
Pertanyaan 6	0,674	0,209	Valid
Pertanyaan 7	0,578	0,209	Valid
Pertanyaan 8	0,703	0,209	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, pengujian validitas instrument penelitian (kuesioner) dengan 8 pertanyaan untuk variabel kineja manajerial mendapatkan nilai r hitung > r tabel, yang mana r tabel dari 88 responden adalah 0,209 sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil pengujian pada masing-masing variabel penelitian yaitu :

Tabel 4.7

Uji Reliabilitas

No	Variabel	Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas publik	0,854	Reliabel
2	Kejelasan sasaran anggaran	0,809	Reliabel
3	Sistem pelaporan	0,756	Reliabel
4	Kinerja manajerial	0,872	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha hitung pada masing-masing variabel penelitian adalah lebih besar dari 0,60. Mengacu pada hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengukuran pada masing-masing variabel penelitian adalah reliabel atau konsisten.

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Pada gambar 4.1 kurva Normal P-P Plot dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

Dalam penelitian ini untuk memperkuat asumsi normal atau tidaknya penelitian ini, yang mana sebelumnya telah dijelaskan pada grafik normal *probability* plot diatas, maka dilakukan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui normalitas berikutnya dengan *Uji Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Adapun hasil output spss uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.99358062
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.060
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.081 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

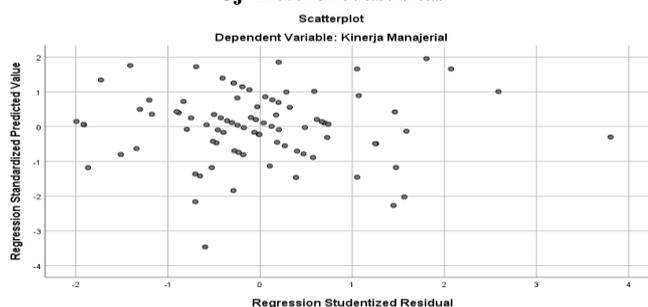
Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Dari hasil pengolahan data uji *kolmogorov-smirnov* pada tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dimana nilai signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.

4.2.3.2 Uji Heterokedastisitas

Adapun hasil dari uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2
Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan gambar 4.2 diatas maka model regresi penelitian ini tidak terjadi heterodastisitas. Hal ini dapat dilihat dari grafik *scatter plot* diatas, terlihat bahwa titik menyebar secara acak, membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y.

4.2.3.3 Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.916	3.698		.248	.805		
Akuntabilitas Publik	.362	.087	.395	4.179	.000	.762	1.313
Kejelasan Sasaran Anggaran	.254	.107	.225	2.368	.020	.753	1.328
Sistem Pelaporan	.491	.130	.314	3.770	.000	.984	1.016

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 diatas terlihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel akuntabilitas publik (x_1) sebesar 0,762, kejelasan sasaran anggaran (x_2) sebesar 0,753 dan sistem pelaporan (x_3) sebesar 1.016 memiliki angka *variance inflaciton factor* (VIF) dibawah angka 10. Dengan demikian bearti dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak mengandung multikolinearitas.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesa

4.2.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menguji apakah akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan SPSS 26.0, dilakukan dengan menginterpretasikan angka-angka yang termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.916	3.698		.248	.805
Akuntabilitas Publik	.362	.087	.395	4.179	.000
Kejelasan Sasaran Anggaran	.254	.107	.225	2.368	.020
Sistem Pelaporan	.491	.130	.314	3.770	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dirumuskan kedalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,916 + 0,362 X_1 + 0,254 X_2 + 0,491 X_3 + \varepsilon$$

4.2.4.2 Uji Parsial (Uji T)

Adapun hasil dari analisis yang menunjukan koefisien signifikan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Secara Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.916	3.698		.248	.805
Akuntabilitas Publik	.362	.087	.395	4.179	.000
Kejelasan Sasaran Anggaran	.254	.107	.225	2.368	.020
Sistem Pelaporan	.491	.130	.314	3.770	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat diketahui secara terperinci pengujian secara parsial yang dilakukan sebagai berikut :

1. Varabel akuntabilitas publik memiliki t_{hitung} sebesar 4,179 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel akuntabilitas publik sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif signifikan 0,05, maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 2,368 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,020 lebih kecil dari tarif signifikan 0,05, maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Variabel sistem pelaporan memiliki t_{hitung} sebesar 3,770 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel sistem pelaporan sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif signifikan 0,05, maka H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Hasil perhitungan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Uji Hipotesa Secara Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581.211	3	193.737	20.873	.000 ^b
	Residual	779.653	84	9.282		
	Total	1360.864	87			

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Pada tabel 4.12 diatas, dijelaskan bahwa uji Anova (*analysis of varians*) atau uji f, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 20,873 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,71 dengan df pembilang= 3, df penyebut= 87 dan tarif signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga H_4 diterima.

4.2.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilihat dari *adjusted R square* yang artinya seberapa besar kontribusi variabel terikat. Uji koefisien determinasi yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.654 ^a	.427	.407	3.047	.427	20.873	3	84	.000

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Sumber : Data Diolah SPSS 26, 2020

Pada tabel 4.14 diatas menunjukan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,407, hal ini bearti 40,7% variabel kinerja manajerial dipengaruhi oleh tiga variabel penjelas yaitu akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. Sisanya 59,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam variabel penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Variabel akuntabilitas publik memiliki t_{hitung} sebesar 4,179 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel akuntabilitas publik sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif signifikan 0,05, maka H_1 diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukan akuntabilitas publik memiliki indikator yang dominan yaitu adanya akuntabilitas publik yang bearti pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakannya kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat tersebut sehingga membuat kinerja pemerintah daerah dapat dinilai dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Penelitian ini sejalan dengan Efrizar (2017) yang menunjukan hasil bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Menurut Efrizar (2017) akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berat pada proses penganggaran, dimulai dari perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan dimana akuntabilitas harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada kinerja pemerintah.

4.3.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 2,368 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,020 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka H_2 diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukkan manajer tingkat menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melakukan tugasnya di pemerintah sudah mengetahui dengan jelas sasaran dan tujuan yang harus dicapai dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini sejalan dengan Melia dan Sari (2019) yang membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial karena tujuan yang jelas dan sulit dalam organisasi dapat membuat pegawai atau manajer bekerja lebih giat dalam mencapai sasaran sehingga kinerja yang dihasilkannya lebih tinggi daripada tidak ada tujuan atau keharusan yang harus mereka capai.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sistem pelaporan memiliki t_{hitung} sebesar 3,770 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel sistem pelaporan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan Efrizar (2017) yang membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial, karena sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Variabel independen akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 20,873 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,71 dengan df pembilang= 3, df penyebut= 87 dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Rasionalnya adalah akuntabilitas publik memiliki kinerja pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Kejelasan sasaran anggaran bekerja lebih giat dalam mencapai sasaran sehingga kinerja yang dihasilkannya lebih tinggi daripada tidak ada tujuan atau keharusan yang harus mereka capai. Sistem Pelaporan baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Melia (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial karena dengan adanya akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran yang baik maka secara simultan diikuti oleh peningkatan pada kinerja manajerial.

5 KESIMPULAN

1. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh dari nilai (*Adjusted R Square*) sebesar 0,407, hal ini berarti 40,7% variabel kinerja manajerial dipengaruhi oleh tiga variabel penjelas yaitu akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. Sisanya 59,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam variabel penelitian ini.
2. Variabel akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan t_{hitung} sebesar 4,179 dengan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel akuntabilitas publik sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka H_1 diterima atau secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 2,368 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,020 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka H_2 diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran

- anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Variabel sistem pelaporan memiliki t_{hitung} sebesar 3,770 sedangkan t_{tabel} 1,9886 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan untuk variabel sistem pelaporan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir.
 5. Hasil penelitian berdasarkan uji Anova (*analysis of varians*) atau uji f, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 20,873 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,71 dengan df pembilang= 3, df penyebut= 87 dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Hartini, 2017. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Pada OPD Pendidikan Dan Kebudayaan, OPD Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dan Sekretariat DPRD)*. SKRIPSI. Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang
- Aini, Syamratul, 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial*. Vol. 3 No. 1 Februari 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Darmawan, 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di SKPD Kabupaten Bengkalis*. Vol. 3 No. 1 Februari 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Efrizar Rona, 2017. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial*. Vol. 4 No. 1 Februari 2017, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Indriantoro Dan Supomo, 2016. *Metotologi Penelitian Bisnis*. BPFE : Yogyakarta
- Kanji, 2016. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial Dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*. No.XIX ISSN : 1907 – 5480 Jurnal Imiah BONGAYA Manajemen & Akuntansi. Dosen Tetap STIEM Bongaya.
- Kurnia, 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten Sukoharjo*. SKRIPSI. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahmudi, 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta
- Melia dan Sari, 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Agustus 2019, ISSN : 2656-3649 (online). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mukaromah, 2018. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi*. SKRIPSI. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Nugraha Dwi, 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Vol. 2, No. 2 Oktober 2015. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Nurlia, Sri. 2018. *Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Pengendalian Akuntansi, Partisipasi Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen*. SKRIPSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Solina, Meria, 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Tanjung Pinang*. SKRIPSI, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.

www.mediacenter.riau.go.id
www.riau.go.id